

ISLAM DAN NASIONALISME DI INDONESIA (Sebuah Tinjauan Sejarah)

Oleh: Susmihara

Abstrak

Nasionalisme tetap merupakan sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara “kita yang sebangsa” dengan “mereka dari bangsa lain” antara negara kita dan negara mereka. Demikian pula dalam konteks sejarah, Nasionalisme dimaknai sebagai tindakan politik untuk mengubah status Indonesia sebagai bangsa terjajah agar menjadi bangsa merdeka. Dalam perkembangannya Nasionalisme Indonesia tidak saja ditujukan untuk melawan kolonialisme Barat tetapi untuk melawan semua bentuk kolonialisme, tidak peduli Barat atau Timur. Islam sebagai kekuatan pembebas tidak saja bergandengan dengan Nasionalisme itu, tetapi sekaligus memberi fondasi spiritual yang kokoh kepada masyarakat Indonesia, mengobarkan semangat anti penjajah baik dalam teori maupun praktek.

Kata Kunci: Islam; Nasionalisme; Indonesia.

Pendahuluan

Nasionalisme dalam konteks sejarah kontemporer Indonesia tampaknya dimaknai sebagai kepercayaan dan tindakan politik untuk mengubah secara radikal status Indonesia sebagai bangsa terjajah agar menjadi bangsa merdeka. Dalam kalimat lain, nasionalisme Indonesia bertujuan untuk meruntuhkan sistem kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apa pun dan dari mana pun asalnya. Alinea pertama UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 menegaskan rumusan kepercayaan dan tindakan itu sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”¹ Kemudian Islam sebagai doktrin dan tindakan pembebasan telah mendorong dan mengilhami mayoritas penduduk nusantara untuk

¹Lihat UUD 1945 alinea pertama dari Pembukaan.

melawan penjajahan demi mempertahankan kemerdekaan, jauh sebelum nasionalisme dikenal orang. Adapun ternyata umat Islam tidak berjaya menghalau penjajahan itu sampai dengan masa proklamasi 17 Agustus 1945 semata-mata karena persoalan sejarah yang terkait dengan kelemahan dalam penguasaan persenjataan dan teknik perang modern. Makalah ini akan mencoba melihat hubungan Islam dan nasionalisme di Indonesia, baik dalam konsep maupun dalam wilayah praksisme. Dibicarakan pula keberatan-keberatan pihak Islam terhadap nasionalisme dalam arti ideologi dan filsafat politik.

Islam dan Nasionalisme: Doktrin dan Kekuatan Pembebasan

Menurut Soekarno, nasionalisme atau perasaan nasionalistis itu “menimbulkan rasa percaya akan diri sendiri, rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan, yang mau mengalahkan kita.”² Dikatakan juga bahwa “Nasionalisme itu ialah suatu iktikad; suatu *keinsyafan* rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu ‘bangsa’!”³ Dalam perkembangannya, nasionalisme Indonesia tidak saja ditujukan untuk melawan kolonialisme Barat, tetapi untuk melawan semua bentuk kolonialisme, tidak peduli Barat atau Timur. Di sini Islam sebagai kekuatan pembebas tidak saja bergandengan dengan nasionalisme itu, tetapi sekaligus memberikan fondasi spiritual yang kokoh kepadanya. Watak ini selama Perang Dunia II tidak dipahami dengan baik oleh Jepang yang masih berpikir bahwa nasionalisme Indonesia hanyalah anti Barat, tidak anti Jepang. Kesalahpahaman ini telah menempatkan pasukan Jepang pada posisi ruwet dan rumit dalam berhubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis yang sebagian besar menganut Islam. Islamlah selama berabad-abad yang mengobarkan semangat anti penjajahan ini, baik dalam teori maupun dalam praktik, seperti telah disinggung di atas.

Sebelum diurai lebih jauh tentang hubungan nasionalisme dengan Islam, kita perlu terlebih dahulu mempunyai pemahaman yang memadai tentang Islam sebagai kekuatan pembebas berhadapan dengan kebijakan kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan Islam selama empat dekade pertama abad ke-20. Bahkan sebenarnya bila ditelusuri lebih mendalam tentang akar sejarah perlawanan Islam terhadap sistem penjajahan, kita dapat memulainya sejak

²Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, 2 jilid. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965, I: 3-4. Ejaan disesuaikan dengan ejaan baru yang disempurnakan..

³*Ibid.*, h, 3. Juga dilakukan penyesuaian ejaan.

munculnya V.O.C. (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, Kompeni Hindia Timur) pada permulaan abad ke-17. V.O.C. sebagai usaha dagang yang telah mengeksploitasi sumber-sumber pribumi “melalui cara perniagaan (*a mercantile way*)”⁴ bahkan telah sejak semula mendapat permusuhan dari umat Islam di Indonesia.⁵ Permusuhan itu sudah bercorak laten yang sewaktu-waktu akan muncul ke permukaan. Secara doktrin, Islam dan sistem penjajahan adalah dua sisi sangat berlawanan.

V.O.C. memulai debut perdagangannya di nusantara pada 1602 dan berakhir pada 1799. Selama hampir 200 tahun ini, aparatus kolonial Belanda tidak pernah merasa tenang bila berurusan dengan komunitas-komunitas Muslim di Indonesia. “Pada berbagai kejadian”, tulis Benda, “konsolidasi bagi perluasan kekuasaan mereka terancam oleh ledakan-ledakan perlawanan yang diilhami Islam, baik yang dipimpin oleh penguasa-penguasa Indonesia yang telah mengikuti iman Nabi, atau pada tingkat lokal, oleh para ulama yang fanatik....”⁶ Fanatisme di sini hendaklah ditafsirkan sebagai refleksi logis dari kecintaan mereka terhadap kemerdekaan serta kebencian mereka terhadap kekuasaan dan dominasi asing. Asing dalam perspektif ini tidak saja asing dalam arti agama, tetapi juga asing dalam arti bangsa. Terlihat di sini semangat agama telah menyatu dengan semangat bangsa, sekalipun pengertian bangsa pada waktu itu sama maknanya dengan suku bangsa, seperti bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Minang, bangsa Menado, bangsa Bugis.

Perlawanan terhadap sistem kolonial dalam skala besar terjadi pada abad ke-19. Perang Padri (1821-1837), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1872-1912), dan banyak yang lain, adalah di antara bentuk perlawanan yang berskala besar itu dengan korban yang sangat besar pula pada pihak-pihak yang bertarung. Melihat tahun-tahun perlawanan di atas dapatlah dipahami mengapa misalnya sejarawan T. Ibrahim Alfian menolak mitos yang sering kita dengar bahwa Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun karena tidak cukup alasan untuk menerimanya.⁷ Tokoh bangsa Mohammad Natsir (1908-1993) juga menolak angka siluman 350 tahun itu sebab itu hanya berlaku bagi sebagian kecil wilayah nusantara, khususnya pada daerah-daerah

⁴J.D. Legge, *Indonesia*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1964, h. 67.

⁵Harry J. Benda, *Continuity and Change in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972, h. 83.

⁶*Ibid.*

⁷Lihat T. Ibrahim Alfian, “Perang Aceh 1872-1912: Perang di Jalan Allah.” *Suara Muhammadiyah*, Th. ke-61, No. 2 (Juni 1981), h. 34.

tertentu di Jawa.⁸ Aceh sendiri seperti terlihat pada angka di atas hanyalah sempat dijajah Belanda selama 30 tahun (1912-1942), daerah tersingkat yang pernah berada di bawah sistem penjajahan. Orang Aceh pantas punya kebanggaan sejarah untuk kenangan heroik yang luar biasa itu.

Setelah menyadari panasnya bumi panasnya bumi permusuhan Muslim terhadap kolonialisme Belanda, C. Snouck Hurgronje sering mengungkapkan: "... sebuah pemerintahan di kafir pada hakekatnya adalah ilegal di mata Islam."⁹ Oleh sebab itu, bagi seorang Muslim, berjuang melawan setiap tipe kolonialisme sama artinya dengan berjuang di jalan Allah, sebagaimana al-Qur'an memang mewajibkan untuk itu. Strategi jangka panjang mereka adalah kekuatan Belanda harus terusir dari nusantara dan kemerdekaan penuh harus direbut kembali! Gagasan inilah yang tertanam dalam diri umat Islam, sekalipun mereka selalu gagal mewujudkannya sampai bulan Agustus 1945. Kegagalan ini tidak sulit untuk dilacak sebab-sebabnya yaitu terutama keunggulan penguasaan musuh dalam teknik perang dan persenjataan modern, sesuatu yang tak tertandingi oleh persenjataan yang dimiliki pejuang-pejuang Muslim dalam berbagai kontak senjata. Terlihat di sini bahwa do'a panjang dengan persenjataan ala kadarnya saja sering benar dilumpuhkan musuh. Tambahan lagi, pecahnya perlawanan-perlawanan yang diilhami Islam itu hampir selalu bersifat lokal dan sporadis. Tidak pernah dalam bentuk kesatuan yang menyeluruh, karena memang pada waktu itu kita belum lagi mengenal konsep kebangsaan seperti dicanangkan oleh Sumpah Pemuda 1928. Inilah di antara sisi-sisi lemah dari perlawanan sporadis itu.

Belajar dari kegagalan demi kegagalan untuk mendapatkan kemerdekaan dari kekuasaan asing pada abad ke-19, dengan kedatangan abad ke-20, umat Islam telah merubah strategi perjuangannya dari bentuk perang fisik kepada bentuk gerakan sosio-agama dan sosio-politik. Dari pihak musuh, umat Islam banyak juga mengambil pelajaran, seperti membentuk organisasi-organisasi modern dalam rangka menyiapkan umat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Asumsi dasarnya adalah bahwa tanpa sebuah umat yang cerdas akan sulit sekali mereka memahami arah perbuatan zaman. Melalui organisasi ini umat dilatih untuk berjuang secara teratur, berencana, dan menggunakan rasio sehat. Terjadilah proses pencerdasan, pencerahan dan pencairan berpikir. Dalam iklim kolonial pada masa itu, muncullah pergerakan

⁸Lihat Mohammad Natsir, *The Role of Islam in The Promotion of National Resilience*. Jakarta: The Organizing Committee of the Diplomatic Club, 1976, h. 4.

⁹Dikutip dalam G.H. Bousquet, *A French View of The Netherlands Indies*, terj. Philip E. Lilienthal. London and New York: Oxford University Press, 1940, h. 19.

Islam modern ini jelas merupakan sebuah terobosan sejarah. Umat ini memang sudah terlalu lama hidup dalam kebekuan berpikir. Jati dirinya telaah remuk, lahir batin. Organisasi-organisasi ini dengan gaya dan caranya masing-masing pada dataran praksis sepenuhnya bersifat nasionalistik, sekalipun mereka tidak menganut filsafat nasionalisme dalam makna memberhalakan negara-bangsa, seperti yang diajarkan Hegel dan Rousseau.¹⁰ Umat Islam cukup sadar bahwa setiap pemberhalaan terhadap negara dan bangsa sama artinya dengan memasukkan diri ke dalam kubangan syirik, dosa besar yang tak terampuni. Betapa pun rendahnya pendidikan umat pada waktu itu, dosa syirik ini telah mereka kenal. Pendewaan negara-bangsa termasuk syirik politik.

Di antara gerakan Islam modern yang muncul selama tiga dekade awal abad ini adalah SI (Sarekat Islam), Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis (Persatuan Islam), NU (Nahdlatul Ulama), JIB (*Jong Islamieten Bond*), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Selain itu muncul pula beberapa organisasi Islam lokal di beberapa tempat dengan sifat khasnya masing-masing. Sekalipun berbagai, tujuannya satu: bagaimana menyiapkan dan mencerdaskan umat untuk menghadapi masa depan yang bebas dari sistem penjajahan asing. Semua organisasi di atas tetap bertahan sampai sekarang, sekalipun beberapa di antaranya pernah mengalami alih fungsi menjadi partai politik seperti NU dan Perti, untuk kemudian kembali lagi kepada bentuk semula. SI juga beberapa kali mengalami alih fungsi itu, sementara Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persis tetap bertahan dalam kepribadian aslinya. Dalam arti radius pengaruh, maka Muhammadiyah dan NU adalah yang terbesar dibandingkan dengan mitranya yang lain itu.

Selain gerakan-gerakan yang berbasiskan Islam di atas, muncul pula gerakan-gerakan kultural-pendidikan dan politik yang tidak menjadikan agama sebagai pembimbing langkahnya, sekalipun sebagian besar tokohnya adalah

¹⁰‘Negara’, tulis G.W.R. Hegel (1770-1831), ‘adalah gagasan ketuhanan sebagaimana ia ujud di muka bumi.’ (lihat Ronald H. Nash (ed.), *Ideas of History*, 2 jilid. New York: E.P. Dutton & Co., 1969, 1:86. Hegel adalah filosof idealis kelahiran Jerman yang mengilhami Karl Marx (1819-1883) dalam menyusun hipotesisnya tentang determinisme ekonomi dan materialisme historikal, tapi dalam bentuk yang sudah dijungkirbalikkan. Kemudian J.J. Rousseau (1712-1778) seorang pengagum *polis* (negara kota) model Yunani kuno memandang ide tentang bangsa sebagai sesuatu yang teramat mulia.. ada yang menarik tentang aspek pribadi dari pemikir kelahiran Swiss ini, seperti yang dituturkan oleh satu-satunya kekasih yang pernah hidup bersamanya, Sophie d’Hoidetot: ‘He was ugly enough to frighten me and love did not make him more attractive. But he was a paunetic figure and I treated him with gentieness anf kindness. He was an interesting madman’ (Dikutip dari Paul Johnson, *Intellectuals*. New York: Harper Perennial, 1990, h. 27. Gagasan si gila yang menarik inilah yang menjadi salah satu pilar negara-negara di masa modern. Dalam perspektif ini tidaklah perlu terlalu diherankan mengapa dunia modern semakin gila saja, tidak semakin arif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang tambah ruwet dari hari ke hari.

penganut Islam. Contoh untuk ini dapat disebutkan seperti BU (Budi Utomo), IP (*Indische Partij*), PKI (Partai Komunis Indonesia), Taman Siswa, PI (Perhimpunan Indonesia) di negeri Belanda dan PNI (Partai Nasional Indonesia). Sama halnya dengan gerakan-gerakan Islam di atas, yang tersebut terakhir ini memakai payung nasionalisme atau marxisme/sosialisme. Mereka juga mencita-citakan terbentuknya sebuah Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Kecuali PKI yang selalu bersandar pada kekuatan asing, semua gerakan kebangsaan di atas bertumpu pada kekuatan sendiri. PKI pada saat dibubarkan pada 1966 lantaran melakukan makar politik, keterkaitannya dengan negara asing tidak pernah lepas, apakah itu Moskow atau Beijing. Dengan demikian konsepnya tentang kedaulatan bangsa adalah kedaulatan di bawah payung asing. Inilah tragedi yang melekat pada partai yang menyebut dirinya sebagai partai paling radikal dan revolusioner itu.

SI pada masa awal kelahirannya adalah salah satu kekuatan politik Indonesia yang paling hebat. Berawal dari SDI (Sarekat Dagang Islam) yang berdiri pada 1911, di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto (1883-1934) SI pada 1912 mengubah dirinya menjadi partai politik. Dan jadilah SI sebagai partai tertua dalam sejarah Indonesia. Alumnus dari Sekolah Administratur Belanda, Tjokroaminoto adalah Muslim pertama di Indonesia yang menyatakan Islam sebagai “faktor pengikat dan sebagai simbol nasional”¹¹ dalam perjalanan menuju kemerdekaan penuh. Dari perspektif ini, SI adalah gerakan politik nasional pertama yang terbuka bagi semua tanpa memandang suku, bahasa dan latar belakang sejarah. Orang tentu akan sulit membandingkan SI dengan BU (berdiri 1908) yang membatasi keanggotaannya pada priyayi Jawa dan kemudian Madura, sementara pemimpin-pemimpinnya berasal “dari eselon puncakaristokrasi Jawa.”¹² Barulah pada awal 1930-an BU terbuka untuk semua rakyat Indonesia. Berbeda dengan BU, SI adalah partai rakyat biasa yang dipimpin oleh kaum intelektual Muslim, sesuatu yang baru dalam sejarah umat Islam Indonesia.

¹¹Donald E. Smith (ed), *Religion, Politic, and Social Change in The Third World*. New York: The Free Press, 1971, h. 109.

¹²George McTurnan Kahin, *Nasionalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1970, h. 65. Ada pendapat yang mengatakan bahwa SI didirikan pada 16 Oktober 1905, tiga tahun sebelum BU, tapi kesulitan kita adalah menemukan dokumen tertulis untuk fakta semacam itu. Tetapi pada sisi lain memang tidak diragukan lagi bila dibandingkan dengan BU, SI sudah sejak awal bercorak nasional, sekalipun kemudian keputusan politik menetapkan bahwa BU-lah sebagai pelopor kebangkitan nasional.

Sampai memisahkannya unsur kiri dari partai ini pada 1921, SI adalah gerakan politik terbesar dan paling menarik di Indonesia. Setelah ditinggal kekuatan komunis, SI tidak pernah lagi mampu memulihkan masa lampaunya yang hebat itu. Kejadian ini merupakan pengalaman tragis dari gerakan politik nasional yang mula-mula itu. Pada waktu sekarang, SI masih bersama kita tapi dalam postur yang kecil, sukar dibandingkan misalnya dengan Muhammadiyah dan NU yang memiliki “imperium” keagamaan, kemannusiaan, dan pendidikan dalam skala besar. Tetapi SI tidak akan pernah dilupakan orang sebagai gerakan nasional pertama yang menjadikan Islam sebagai basis ideologinya. Kemudian, seperti telah disinggung di atas, SI kemasukan unsur kiri. Melalui kegiatan politik tokoh-tokoh kiri Belanda seperti H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942), J.A. Brandsteder, P. Bergsma, pada dekade kedua abad ini, beberapa pemimpin SI, khususnya cabang Semarang, berhasil ‘dimerahkan’. Islam kini harus bergumul dengan marxisme yang pada waktu itu mulai berada di atas angin, lebih-lebih setelah V.I. Lenin (1870-1924) berjaya dengan Revolusi Oktobernya pada 1917. Pada 1926/1927 PKI dengan persiapan seadanya dan dengan kepemimpinan yang terbelah mengadakan pemberontakan di Jawa dan di Sumatera. Pemberontakan ini dengan mudah dapat ditindas.¹³ Akibatnya PKI dibubarkan dan pemimpin-pemimpinnya dibuang ke Digul atau melanglangbuana selama beberapa tahun di Rusia, Cina, Asia Tenggara, dan Eropa. Sekalipun ideologi kiri terusir dari Indonesia, SI, sekali lagi, tidak mampu lagi memperbaiki citra dirinya sebagai partai pelopor kebangkitan rakyat tertindas. Peluang ini digunakan Soekarno (1901-1970) dan kawan-kawannya untuk mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927 dengan mengembangkan ideologi nasionalisme sekuler radikal. Secara politik, Soekarno ingin mendamaikan Islam, marxisme, dan nasionalisme, demi persatuan bangsa untuk mempercepat tercapainya kemerdekaan.¹⁴

Islam vs. Nasionalisme

H.A. Salim pada 1928 dalam jawabannya kepada pembelaan Soekarno yang menyala-nyala terhadap nasionalisme hanya mengingatkan agar ideologi ini tidak dipisahkan dari keimanan seseorang kepada Allah. Kita kutip: “Cinta

¹³Tentang pemberontakan 1926/1927, baca Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1965.

¹⁴Pada tahun 1926 dalam *Soeloeh Indonesia Moeda*, Soekarno dengan penuh semangat menulis artikel yang menekankan perlunya kerjasama antara nasionalisme, Islam, dan marxisme. Lihat Soekarno “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” dalam Soekarno, *op.cit.*, 1: 1-23.

kepada tanah air, agama, karena Allah Ta'ala dan menurut perintah Allah semata-mata.”¹⁵ Ungkapan “karena Allah semata-mata” menjadi sangat krusial bagi Salim karena jika tidak nasionalisme akan bergerak tanpa kendali. Di mata Salim, nasionalisme tanpa bimbingan semangat universalisme agama akan sangat berbahaya dan agresif. Salim memberikan contoh dalam sejarah dunia: “...Atas nama ‘tanah air’...bangsa Prancis dengan gembira menuruti Lodewijk XIV, penganiaya dan pengisap darah rakyat itu, menyerang, merusak, membinasakan negeri orang dan rakyat bangsa orang, sesamanya manusia.... Atas nama ‘tanah air’ kerajaan Prusia merobohkan Austria daripada derajat kemuliaannya itu.”¹⁶

Apa yang dikhawatirkan Salim adalah kemungkinan bahwa nasionalisme boleh jadi akan menjadi berhala di mata para pembelanya. Jadi, atas nama nasionalisme, Indonesia di masa depan dikhawatirkan akan mengikuti langkah-langkah agresif dan ekspansif itu untuk menaklukkan bangsa lain tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai agama universal. Maka untuk mengantisipasi serba kemungkinan inilah Salim memperingatkan tokoh-tokoh nasionalisme sekuler tentang tanggung jawab moralnya di depan Tuhan dan di depan sejarah. Bukankah kerajaan-kerajaan kuno Buda atau Hindu pada masa lampau di nusantara juga pernah terlibat dalam drama ekspansionis dan agresif.

Salim dalam tulisan-tulisannya tidaklah menempatkan nasionalisme Indonesia sebagai lawan Islam. Yang diingatkannya adalah agar ideologi ini tidak keberatan untuk mentransendensikan dirinya dengan cara menyerap nilai-nilai kenabian seperti yang diajarkan wahyu. Nasionalisme yang dimbing nilai-nilai profetik diharapkan untuk terhindar dari bahaya parokialisme yang destruktif dan bodoh. Ringkasnya Salim tidak ingin melihat nasionalisme Indonesia membuat jarak yang jauh dengan doktrin universalisme Islam. Kemudian Salim mengimbau pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia yang tergabung dalam PI (Perhimpunan Indonesia) di negeri Belanda pada tahun 1920-an untuk memahami sejarah Nabi Muhammad dan dijadikan teladan. Mereka jangan hanya tergiur oleh pemikir-pemikir Barat hingga melupakan tokoh lain yang lebih sempurna. Salim menulis:

Hendaklah dipikirkannya riwayat Nabi Muhammad saw, penghulu umat Islam, teladan yang utama bagi segala manusia, yang telah diakui oleh sekalian orang berakal dan berpengetahuan dalam seluruh dunia, bahwa

¹⁵Lihat Hazil Tanzil (ed.), *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, h. 349.

¹⁶*Ibid.*, h. 347.

ialah seorang pengubah (*hervormer*) yang sebesar-besarnya yang tidak ada bandingannya dalam suatu bangsa atau sesuatu zaman.

Hendaklah mereka perhatikan sikap dan usaha manusia yang amat mulia itu tatkala membangunkan bangsanya, –bangsa biadab dan terhina– dijadikannya bangsa utama dan raja bangsa dalam sedikit masa.¹⁷

Memang pada masa itu tokoh nasionalis yang paham Islam jumlahnya amat sedikit. Mungkin Mohammad Hatta termasuk yang sedikit itu. Itulah sebabnya Salim mengimbau mereka agar mau belajar Islam dan sejarah Nabi. Bukankah kaum nasionalis itu berasal dari sebuah bangsa yang mayoritas Muslim?

Soekarno dalam artikel yang telah dikutip sebelumnya juga berusaha untuk menghilangkan salah paham antara berbagai ideologi politik di Indonesia. Tapi ambisinya untuk mendamaikan Islam dan marxisme dipandang tidak realistis karena antara keduanya memiliki unsur-unsur filosofis yang tidak mungkin didamaikan. Aspek ateistik dari marxisme merupakan kendala utama mengapa Islam harus menolaknya. Rupanya obsesi Soekarno yang mendalam untuk terciptanya persatuan nasional telah menyebabkannya lupa terhadap perbedaan mendasar antara Islam dan marxisme. Dalam pada itu, amat kontras dengan Soekarno, Hatta, tokoh nasionalis yang lain, sadar sepenuhnya bahwa adalah sebuah kesia-siaan untuk mengawinkan Islam dengan marxisme/komunisme. Hatta tidak pernah percaya kepada komunisme.¹⁸ Studi tentang marxisme dan pengalamannya di negeri Belanda telah semakin meyakinkan Hatta bahwa komunisme tidak pernah dapat diandalkan untuk bekerjasama.

Pandangan Hatta tentang nasionalisme sebagai anti tesis terhadap imperialisme di negeri jajahan. Hatta tidak kurang “garang”-nya dibandingkan Soekarno bila berbicara tentang masalah penjajahan. Tapi tokoh ini tidak mau mengawinkan nasionalisme dengan komunisme, seperti halnya Soekarno, sebab hal itu akan sangat berbahaya. Dalam pidato inaugurasinya sebagai ketua baru Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda untuk menggantikan Dr, Soekiman Wirjosendjojo, pada 17 Januari 1925, dengan judul “Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen” (Bangunan Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kuasaan) dengan tegas Hatta mengemukakan bahwa

¹⁷*Ibid.*, h. 307. Kutipan ini ditulis Salim pada 14 Mei 1925 dan dimuat dalam harian *Hindia Baroe*.

¹⁸Lihat Zainul Yasmi, *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung, 1979, h. 85-86.

“...menghancurkan imperialisme Barat itu ialah usaha peradaban.” Selanjutnya kita kutip:

Aku telah menyebutkan, bahwa imperialisme Barat harus disudahi untuk kepentingan kemanusiaan dan tiap-tiap bangsa yang terjajah mempunyai kewajiban untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan. Dan karena itu Indonesia harus mencapai kemerdekaannya atas dasar kemanusiaan dan peradaban. Dan aku kuatir, bahwa satu-satunya jalan untuk melaksanakan itu, seperti kita lihat tadi, tidak lain dari kekerasan...titik berat daripada perjuangan kita adalah menghancurkan imperialisme Belanda....”¹⁹

Gaya pidato Hatta yang tegas itu mencerminkan watak dan kepribadiannya yang kuat dan kokoh. Sebagai salah seorang wakil dari dunia terjajah yang sewaktu menyampaikan pidato itu usianya baru 23 tahun, kita melihat Hatta sudah sangat dewasa secara intelektual. Menarik juga antisipasinya tentang metode pencapaian kemerdekaan dengan cara kekerasan ternyata kemudian dibenarkan sejarah: perjuangan nasional kita akhirnya ditempuh melalui pengorbanan darah yang banyak tertumpah dan mengalir.

Sekalipun Hatta seorang nasionalis yang bersemangat, ia juga dikenal sebagai Muslim yang taat, di samping sikapnya yang anti-komunis. Karakter ini mengundang rasa hormat yang terdalem dari umat Islam khususnya dan dari bangsa Indonesia umumnya terhadap diri Hatta, kecuali mungkin kaum komunis yang sengaja membencinya karena alasan politik dan kekuasaan. Dalam perspektif moral bangsa, Hatta barangkali adalah sosok kepemimpinan yang terbaik dalam sejarah modern Indonesia pada saat kita kini sedang mengalami krisis berat dalam soal keteladanan itu. Maka kalau ada orang yang mencurigai nasionalisme Hatta, pandangan itu jelas bersifat a-historis, sebab bagi tokoh ini, nasionalisme adalah tangga untuk mencapai “*persaudaraan segala bangsa*.”²⁰

Sudah tentu tipe nasionalisme Hatta akan sangat berlainan dengan nasionalisme Barat yang sudah mencapai tahap ketiga berupa *expansive nationalism*,²¹ untuk meminjam ungkapan Mostafa Rejai, yang tidak lain dari

¹⁹Mohammad Hatta, *Memoir*. Jakarta: Tintamas, 1978, h. 195.

²⁰*Ibid.*. Cetak miring sesuai dengan aslinya.

²¹Lihat Mostafa Rejai, “Nationalism, East and West”, dalam Reo M. Christenson et al. (eds.), *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead & Company, 1975, h. 24-25. Menurut Rejai, ada tiga tipe nasionalisme: *formative nationalism*, bila prosesnya baru pada tahap pembentukan bangunan sebuah bangsa; *prestige nationalism*, bila prosesnya memasuki tahap membesarkan dan memuliakan bangsa; *expansive nationalism*, manakala sudah mencaplok dan menguasai bangsa lain.

imperialisme modern. Nasionalisme Indonesia harus dijaga agar tidak menjurus ke arah nasionalisme ekspansif ini, agar tetap berada dalam kawalan “*persaudaraan segala bangsa*” dalam konsep Hatta, atau dalam bingkai “kemanusiaan yang adil dan beradab” menurut sila kedua Pancasila. A.J. Toynbee (1889-1975) dengan tidak membedakan tipe nasionalisme itu telah sampai kepada kesimpulan bahwa nasionalisme Barat sebagai perpanjangan dari *tribal-minded* (nafsu kesukuan) merupakan salah satu sebab utama dari peperangan antar bangsa.²² Baik Soekarno maupun Hatta menolak segala bentuk nasionalisme yang penuh nafsu ekspansi dalam proses penaklukan terhadap bangsa lain.

Pembicaraan kita tentang hubungan Islam dan nasionalisme akan kurang lengkap bila kita tidak menyebut dua nama ulama dan penulis Muslim yang terkait dengan pembicaraan kita ini: Ahmad Hassan dan Muhammad Isa Anshary. Keduanya tokoh Persis, keduanya anti nasionalisme. Tapi mereka tidak menjelaskan tipe nasionalisme yang mana yang ditolak. Barangkali mereka tidak berbeda dengan Toynbee. Yang ditolak adalah bentuk nafsu kesukuan (*‘ashabiyah*) yang melekat pada nasionalisme itu.²³ Pertanyaan kita adalah apakah nasionalisme seperti yang dipahami Hatta juga harus ditolak? Kalau ditolak, apa alasan utamanya?

Penutup

Nasionalisme dalam bingkai Pancasila atau nasionalisme seperti yang dipahami Hatta tidak dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan Islam. Bahkan dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme, Islam telah bahu membahu dengan nasionalisme di Indonesia. Tapi sekali negara-bangsa warisan konsep Hegel dan Rousseau, sebagai bagian esensial dari nasionalisme Barat dijadikan sesembahan, maka Islam akan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan bodoh dan tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang luhur, karena pasti akan membawa kepada parokialisme, peperangan, dan kemusyrikan. Negara-negara yang didewakan pasti menjurus kepada

“Cukup kritikal untuk dicatat”, tulis Rejai, “koneksi yang rapat antara nasionalisme dan imperialisme...” (hal. 25).

²²Lihat Marvin Perry, *Arnold Toynbee and The Crisis of The West*. Washington D.C.: University Press of America, 1982, h. xiii.

²³Karya yang utuh tentang ini, baca Muhammad Isa Anshary, *Islam dan Nasionalisme*. Bandung-Jakarta: t.p., 1954. Isa hanyalah mengikuti pendapat gurunya A. Hassan tentang nasionalisme ini. Lihat juga G.F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia, 1900-1950*, terj. Tudjiman dan Yesy Agusdin. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984, h. 131-133.

penghancuran perumahan kemanusiaan. Islam dan bahkan semua agama punya misi utama untuk menjaga dan melindungi perumahan kemanusiaan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, T. Ibrahim, "Perang Aceh 1872-1912: Perang di Jalan Allah." *Suara Muhammadiyah*, Th. ke-61, No. 2 (Juni 1981).
- Anshary, Muhammad Isa, *Islam dan Nasionalisme*. Bandung-Jakarta: t.p., 1954.
- Benda, Harry J., *Continuity and Change in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972.
- Bousquet, G.H., *A French View of The Netherlands Indies*, terj. Philip E. Lilienthal. London and New York: Oxford University Press, 1940.
- Hatta, Mohammad, *Memoir*. Jakarta: Tintamas, 1978.
- Kahin, George McTurnan, *Nasionalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1970.
- Legge, J.D., *Indonesia*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1964.
- McVey, Ruth T., *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1965.
- Nash, Ronald H. (ed.), *Ideas of History*, 2 jilid. New York: E.P. Dutton & Co., 1969.
- Natsir, Mohammad, *The Role of Islam in The Promotion of National Resilence*. Jakarta: The Organizing Committee of the Diplomatic Club, 1976.
- Pijper, G.F., *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia, 1900-1950*, terj. Tadjiman dan Yesy Agusdin. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Perry, Marvin, *Arnold Toynbee and The Crisis of The West*. Washington D.C.: University Press of America, 1982.
- Rejai, Mostafa, "Nationalism, East and West", dalam Reo M. Christenson et.al. (eds.), *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead & Company, 1975.
- Smith, Donald E. (ed), *Religion, Politic, and Social Change in The Third World*. New York: The Free Press, 1971.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, 2 jilid. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965.
- Tanzil, Hazil (ed.), *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- UUD 1945 alinea pertama dari Pembukaan.
- Yasmi, Zainul, *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung, 1979.

